

**ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN
HUKUM PAJAK RESTORAN STUDI KASUS DI KABUPATEN
LABUHANBATU**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam
Program Studi Magister Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu**



Oleh:

GITA OKTAVIA

NPM: 2312100008

KONSENTRASI: HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS LABUHANBATU

2025

**ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI PIDANA DALAM
PENEGAKAN HUKUM PAJAK RESTORAN STUDI KASUS DI
KABUPATEN LABUHANBATU**

Oleh:

GITA OKTAVIA

NPM: 2312100008

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program
Studi Magister Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu*

© GITA OKTAVIA

Universitas Labuhanbatu

2025

Hak Cipta dilindungi UU. Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis.

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : GITA OKTAVIA
NPM : 2312100008
Judul : ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI PIDANA DALAM
PENEGAKAN HUKUM PAJAK RESTORAN STUDI
KASUS DI KABUPATEN LABUHANBATU
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Rantauprapat, September 2025

Tesis ini disetujui oleh:

Pembimbing I

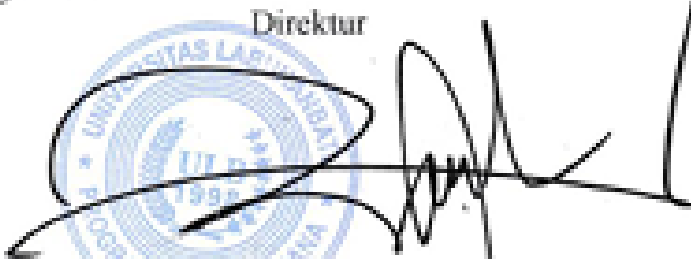

Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H.
NIDN. 0114038801

Pembimbing II


Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.
NIDN. 0108088803

Mengetahui:

Direktur


(Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.)
NIDN: 0108088803

Ketua Program Studi


Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H.
NIDN. 0114038801

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : GITA OKTAVIA
NPM : 2312100008
Judul : ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI PIDANA DALAM
PENEGAKAN HUKUM PAJAK RESTORAN STUDI
KASUS DI KABUPATEN LABUHANBATU
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan lulus
dalam ujian tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H)

pada tanggal September 2025

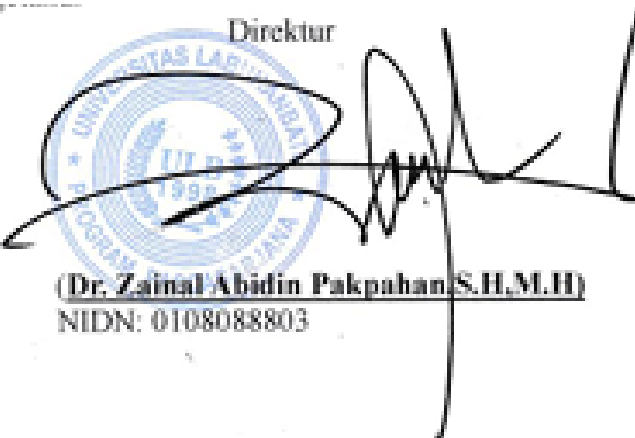
PENGUJI

1. Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.
2. Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI.,M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Lelisari, S.H.,M.H.
4. Assoc. Prof. Dr. Sriono,S.H.,M.Kn.

Ketua Penguji	1.....
Ketua Penguji	2.....
Anggota Penguji	3.....
Anggota Penguji	4.....

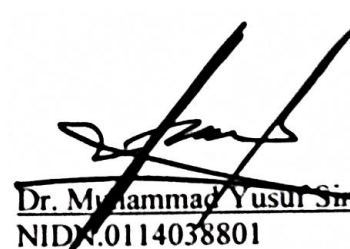
Mengetahui,

Direktur



(Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H.,M.H.)
NIDN: 0108088803

Ketua Program Studi



Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI.,M.H.
NIDN.0114038801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GITA OKTAVIA
NPM : 2312100008
Tempat/Tanggal Lahir : Sigambal, 18 Mei 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. SM. Raja Ujung Bandar
No.Hp : 082294542727
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS ATAS SANKSI PIDANA DALAM
PENEGAKAN HUKUM PAJAK RESTORAN STUDI
KASUS DI KABUPATEN LABUHANBATU

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Labuhanbatu atau di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis saya ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tesis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Apabila salah satu poin di atas saya langgar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena tesis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan, undang-undang dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rantauprapat,
Yang menyatakan



(GITA OKTAVIA)

ABSTRAK

Pajak restoran didefinisikan sebagai pungutan atas jasa yang ditawarkan oleh tempat makan berbayar, meliputi rumah makan, kantin, warung, serta jenis serupa termasuk layanan katering atau boga, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Labuhanbatu No 07 Th 2011 mengenai Pajak Restoran. Fokus studi ini tertuju pada penegakan sanksi pidana denda pajak restoran di Kabupaten Labuhanbatu, dilihat dari perspektif Peraturan Daerah No 07 Th 2011. Analisis yuridis normatif dilangsungkan terhadap penerapan hukuman pidana dalam pengawasan pajak restoran di wilayah tersebut. Sebagai kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak ini kerap menghadapi hambatan kepatuhan dari para wajib bayar. Pendekatan kualitatif diterapkan melalui metode yuridis normatif dan empiris. Wawancara dengan pejabat penegak hukum pajak seperti dari Dinas Pendapatan Daerah dan Kejaksaan—serta observasi lapangan menghasilkan data primer. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari regulasi perUUan relevan, vonis pengadilan, dan sumber literatur hukum. Temuan studi mengungkap bahwa, walaupun didukung UU No 28 Th 2009 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Kabupaten Labuhanbatu No 07 Th 2011 mengenai Pajak Restoran, telah mengatur sanksi pidana, implementasinya masih menghadapi kendala. Kendala tersebut meliputi kurangnya koordinasi antarlembaga, kelemahan dalam pengawasan, serta kesulitan dalam pembuktian unsur pidana. Sanksi pidana jarang diterapkan dan lebih banyak penyelesaian dilangsungkan melalui sanksi administratif, seperti denda dan bunga. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam penegakan hukum pajak restoran di Kabupaten Labuhanbatu masih belum optimal. Studi ini merekomendasikan perlunya peningkatan sinergi antarlembaga, penguatan pengawasan, dan edukasi berkelanjutan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan. Pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha restoran terhadap isi Perda ini masih rendah, yang menyebabkan kepatuhan pajak juga kurang maksimal. Kewenangan Bapenda juga mencakup penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan, tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi tersebut belum memberikan efek jera secara maksimal. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha restoran terhadap kewajiban menyetorkan pajak ke kas daerah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan. Pemerintah daerah disarankan untuk mendorong kesadaran sukarela wajib pajak, melalui pendekatan persuasif dan insentif bagi pelaku usaha yang patuh terhadap kewajiban perpajakan. Bapenda perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik dari segi kualitas SDM, teknologi informasi, maupun penguatan regulasi pelaksana untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak restoran. Sosialisasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha restoran sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, sekaligus membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan wajib pajak.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Hukum Pajak, Pajak Restoran, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Restaurant Tax is a tax on services provided by restaurants for a fee, including eateries, canteens, food stalls, and similar establishments, including catering services. This tax is regulated by Labuhan Batu Regency Regional Regulation Number 07 of 2011 concerning Restaurant Tax. This research focuses on the legal enforcement of criminal sanctions for restaurant tax fines in Labuhan Batu Regency, as reviewed in Regional Regulation Number 07 of 2011. This research analyzes the legal application of criminal sanctions in restaurant tax law enforcement in Labuhan Batu Regency. Restaurant tax, as a crucial source of Regional Original Revenue (PAD), often faces compliance challenges from taxpayers. This study uses a qualitative approach with normative and empirical legal research methods. Primary data was obtained through interviews with tax law enforcement officials, such as the Regional Revenue Service and the Attorney General's Office, as well as direct field observations. Secondary data was collected from relevant laws and regulations, court decisions, and legal literature. The results of the study show that although Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies and Regional Regulation of Labuhanbatu Regency Number 07 of 2011 concerning Restaurant Tax. Although criminal sanctions have been regulated, their implementation still faces obstacles. These obstacles include a lack of inter-agency coordination, weaknesses in supervision, and difficulties in proving criminal elements. Criminal sanctions are rarely applied, and most settlements are carried out through administrative sanctions, such as fines and interest. It can be concluded that the effectiveness of criminal sanctions in enforcing restaurant tax law in Labuhanbatu Regency is still less than optimal. This study recommends the need for increased synergy between institutions, strengthened supervision, and ongoing education for taxpayers to increase legal awareness and compliance. Public and restaurant business owners' knowledge of the contents of this regulation is still low, which results in less than optimal tax compliance. Bapenda's authority also includes the application of administrative sanctions for violations of tax obligations, but in practice, the implementation of these sanctions has not provided a maximum deterrent effect. The lack of knowledge and understanding of restaurant business owners regarding the obligation to deposit taxes into the regional treasury also contributes to the problem. is one of the factors contributing to low compliance. Local governments are advised to encourage voluntary taxpayer awareness through persuasive approaches and incentives for businesses that comply with their tax obligations. The Regional Revenue Agency (Bapenda) needs to improve institutional capacity, both in terms of human resource quality, information technology, and strengthening implementing regulations to support the efficiency and effectiveness of restaurant tax collection. Continuous outreach to restaurant businesses is crucial to increasing tax awareness and compliance, while simultaneously building a better relationship between the government and taxpayers.

Keywords: *Criminal Sanctions, Tax Law, Restaurant Tax, Law Enforcement.*

KATA PENGANTAR

Assalamu a'laikum Wr.Wb.

Segala puji, syukur, dan penghambaan hanya dipersembahkan kepada Allah SWT semata. Dialah satu-satunya tempat memohon pertolongan, pengampunan, serta sanjungan dari hamba-Nya. Berkat limpahan rahmat dan anugerah-Nya, tesis berjudul “Analisis Yuridis Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Pajak Restoran: Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu” berhasil diselesaikan oleh penulis. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, putra Abdullah dan Siti Aminah, yang telah mengorbankan segala yang dimilikinya demi menegakkan kalimat “Laa Ilaaha Illallahu Muhammadarrasulullah”, serta menjadi panutan bagi umat dalam menjalani kehidupan di dunia.

Segala upaya dan kemampuan penulis telah digoreskan sepenuhnya dalam penyusunan tesis ini, namun sebagai hasil karya manusiawi, kekurangan masih menjadi hal wajar. Kritik, saran, serta dukungan konstruktif sangat diharapkan dan diterima dengan hati terbuka oleh penulis agar manfaat maksimal tercapai bagi semua pihak, terutama penulis sendiri serta mereka yang memerlukan atau memanfaatkannya untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian tesis ini dicapai berkat bimbingan, arahan, motivasi, serta pertolongan dari berbagai pihak, sehingga ucapan terima kasih yang tulus disampaikan dengan kerendahan hati kepada semua. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan, maaf dimohonkan kepada seluruh penolong dalam penulisan ini, sekaligus ampunan dipanjatkan kepada Allah SWT. Semoga amal sederhana ini diterima-Nya, serta ridha dan hidayah dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Pada saat ini, izinkan penghargaan serta terima kasih tak terhingga dihaturkan kepada:

1. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si., Psd., beserta para Wakil Rektor, atas dukungan, fasilitas, dan kesempatan yang diberi selama penulis menempuh pendidikan pada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan serta dukungan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Magister Hukum.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H., atas motivasi dan arahan yang senantiasa diberi kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H., selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, serta para penguji tesis yaitu Ibu Assoc. Prof. Dr. Lelisari, S.H., M.H., dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H., M.Kn., atas bimbingan, masukan, dan evaluasi yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.

Secara khusus, tesis ini didedikasikan dengan kerendahan hati dan rasa syukur mendalam kepada seluruh keluarga, terutama orang tua tercinta Ayahanda H. Suhartono dan Ibunda HJ. Gastuti; kakak laki-laki Dr. H. Galih Orlando SH., Spdi, M.kn., Guruh Ochtama, Gani Organda, Ginda Ockafri; serta adik Muhammad Guphi SH. Kasih sayangmu tak ternilai, pengorbananmu tak terbayar, tetes air mata demi kebahagiaan anakmu dalam menuntut ilmu. Di penghujung studi ini, pengorbanan itu dijadikan titik tolak kehidupan bahagia dunia akhirat oleh anakmu. Mereka itulah yang membesarkan dan mendidik penulis penuh kasih sayang, serta berkat doa dan restu mereka penulis mencapai jenjang Magister Hukum.

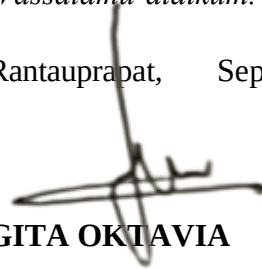
Terima kasih tulus khusus disampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H., selaku Ketua Tim Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan bijaksana memperluas wawasan penulis secara arif, menjadi pengalaman tak terlupakan. Demikian pula kepada Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., Pembimbing II, yang di tengah kesibukan

meluangkan waktu untuk membimbing, mendorong, serta memberi masukan berharga hingga tesis selesai. Semoga pahala dilipatgandakan oleh Allah SWT. Amin ya Robbal alamin.

Akhir kata, ribuan terima kasih kembali diucapkan kepada semua pihak yang disebut maupun tak disebut dalam tesis ini, yang telah berkontribusi atas penyelesaiannya. Semoga balasan dan ridha Allah SWT diperoleh. Wallahu khairu jaza'. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua, menjadi amal jariyah di hadirat-Nya. Amin ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Rantauprapat, September, 2025



GITA OKTAVIA

2312100008

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumus Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
1. Secara Teoritas	17
2. Secara Praktis	17
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori dan konsepsi.....	18
1. Kerangka Teori.....	18
2. Kerangka Konsep	21
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis dan Sifat Penelitian	24
2. Sumber Data Penelitian.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Analisi Data.....	27
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA DENDA PAJAK RESTORAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NO 07 TH PERIHAL PAJAK RESTORAN	28
A. Penegakan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Denda Pajak Restoran.....	28
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	38
C. Penegakan Hukum Dalam Pemungutan	44
D. Pidana Denda Bagi Restoran Yang Tidak Membayar Pajak Berdasarkan Perda No 07 Th 2011 Perihal Pajak Restoran	47

BAB III KEWENANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI KABUPATEN LABUHANBATU.....	48
A. Kewenangan Bapenda Dalam Pemungutan Pajak Restoran.....	48
B. Kewenangan Dan Tujuan Pemeriksaan Pajak	60
C. Kendala Bapenda Dalam Mengutip Pajak Restoran Di Kabupaten Labuhanbatu	72
D. Hak Bapenda Dalam Memanggil Pihak Restoran Yang Tidak Membayar Pajak	75
BAB IV SANKSI PIDANA DENDA BAGI PEMILIK RESTORAN APABILA TIDAK MEMBAYAR PAJAK KE KAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU	80
A. Penerapan Sanksi Pidana	80
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Restoran Yang Tidak Membayar Pajak.....	85
C. Ketentuan Sanksi Pidana Denda Pajak Restoran Dalam Ketentuan Perda No 07 Th 2011	87
D. Pemberian Sanksi Pidana Denda Bagi Pemilik Restoran Apabila Tidak Menyetorkan Pajak Restoran ke Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109